



DEPARTEMEN MANAJEMEN
DAN KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Silabus

Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Departemen
Manajemen dan Kebijakan Publik

FISIPOL UGM

Silabus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

A. Deskripsi

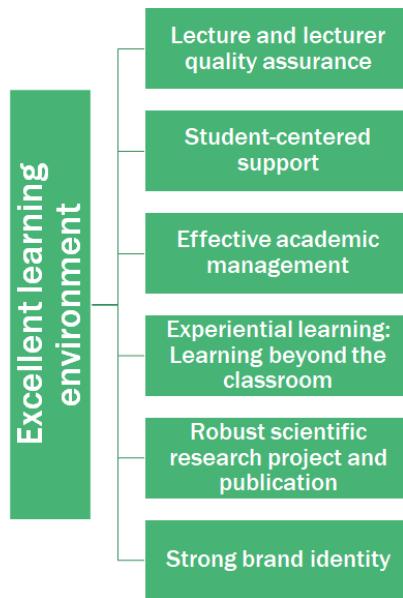
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran inovatif untuk mengembangkan kapasitas, kreativitas, maupun kepribadian mahasiswa untuk menjadi individu yang lebih siap menghadapi dunia pasca perkuliahan. Melalui kegiatan MBKM, para mahasiswa juga diharapkan menjadi pembelajar yang kreatif, inovatif, solutif dan bisa menjadi *agile learner* pada masanya. Kebutuhan akan *link and match* untuk memenuhi arus perubahan yang cepat di berbagai bidang pengembangan keilmuan dan dunia kerja menuntut Perguruan Tinggi, dalam konteks ini Prodi S1 Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) FISIPOL UGM dituntut untuk merancang dan menerapkan proses pembelajaran yang *out of the box* dan sejalan dengan prinsip-prinsip MBKM. Kegiatan pembelajaran MBKM merupakan usaha untuk mewujudkan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Hal ini merupakan kesempatan sekaligus tantangan bagi mahasiswa khususnya dalam konteks mengembangkan kemandirian serta pengalaman dalam menemukan pengetahuan baru dalam dinamika lapangan secara riil. Mahasiswa juga diarahkan untuk menjadi lulusan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan keilmuan, tuntutan dunia kerja/industri/usaha, dan dapat bersaing serta berkolaborasi dengan kebutuhan kompetensi secara global. Kegiatan MBKM menurut Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 meliputi 8 arena yaitu magang/praktek kerja, pertukaran pelajar, membangun desa, studi independen, kewirausahaan sosial, proyek kemanusiaan, riset dan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Beberapa tujuan utama penyelenggaraan arena MBKM yakni:

- a. Mendukung penyediaan fasilitas hak belajar di luar program studi yang tercantum dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15.
- b. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan *experiential learning* bagi mahasiswa.
- c. Menghasilkan lulusan yang adaptif dengan dinamika di dunia pekerjaan disertai dengan kemampuan *soft skills* dan *hard skills* yang baik sesuai dengan kebutuhan zaman.
- d. Membangun ekosistem pengetahuan yang dapat menghubungkan DMKP sebagai institusi pendidikan dengan mitra, industri, masyarakat.

Program ini akan dilaksanakan di lingkup DMKP Fisipol UGM dengan memprioritaskan 4 arena MBKM dengan hasil survei mahasiswa tertinggi yang

terdiri dari Magang, Pertukaran Mahasiswa, Riset yang akan dimulai pada semester ganjil terdekat dan ditambah Kewirausahaan Sosial yang akan dimulai pada semester genap terdekat.

B. Visi-Misi dan Tujuan Program Studi



Visi:

Menyediakan lingkungan pembelajaran yang sangat baik

Misi:

1. Menyediakan perkuliahan dan dosen yang terjamin mutunya.
2. Berpusat pada pendukung layanan mahasiswa.
3. Menciptakan manajemen akademik yang efektif.
4. Menerapkan *Experiential Learning*.
5. Menguatkan proyek riset ilmiah dan publikasi.
6. Membangun identitas merek yang kuat.

C. Capaian Pembelajaran

1. Able to analyze and interpret quantitative and qualitative data related to public policy and decision-making process.
2. Able to evaluate and compare existing public policies and management dynamics.
3. Able to demonstrate systemic thinking to formulate public policies.
4. Able to create public management innovations.
5. Able to lead public and non-public organizations.
6. Able to build inter-organizational networking.

7. Able to influence actors across sectors.
8. Able to advocate for public policy and public sector reform.
9. Able to criticize existing public management and political phenomenon.
10. Able to participate in problem solving and conflict resolutions in public and non-public organizations.
11. Able to articulate values of public interests.

D. Bahan Kajian

DMKP memiliki *tagline* utama yakni “**Strengthening Democratic Public Governance**” dengan mengutamakan lokus kajian pada isu *public interest, public affairs dan public welfare* yang dituangkan ke dalam mata kuliah wajib maupun pilihan.

E. Bentuk Pembelajaran

Departemen MKP (DMKP) Fisipol UGM menyelenggarakan survei terkait MBKM dengan responden sebanyak 73 mahasiswa yang terdiri dari Angkatan 2018, 2019, dan 2020 (angkatan-angkatan yang akan terdampak MBKM). Sebanyak 71 responden memiliki keinginan untuk mengikuti MBKM. Selain itu, hasil survei arena yang sudah dilakukan dapat diperoleh hasil minat tertinggi berturut-turut adalah: 1). Arena magang sebesar 53,5% (38 responden); 2). Arena pertukaran mahasiswa sebesar 16,9 % (12 responden); 3). Arena riset sebesar 11,2 % (8 responden); 4). Arena kewirausahaan sosial sebesar 8,4 % (6 responden). Maka dari itu, pihak DMKP memutuskan untuk berfokus empat (4) arena MBKM tersebut di atas yang akan mulai diimplementasikan pada semester ganjil (arena magang, riset, pertukaran mahasiswa) dan genap (kewirausahaan sosial). Keputusan ini diambil sebagai langkah transisi dan uji coba di Tahun Akademik 2021/2022 sebelum sepenuhnya menawarkan keseluruhan arena MBKM pada tahun-tahun akademik sesudahnya.

F. Proses Pembelajaran

Sejak era pandemi covid-19, DMKP Fisipol UGM telah beradaptasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh dengan metode asinkronus maupun sinkronus telah menjadi kegiatan pembelajaran yang selalu dikembangkan. Maka dari itu, DMKP Fisipol UGM akan mem

G. Cara Penilaian

H. Struktur Silabus dan Sebaran Mata Kuliah (Sudah)

I. Silabus dan Perangkat Pembelajaran MBKM

No	Arena/BKP	Bentuk Implementasi	Durasi	Konversi SKS	Output	Semester diadakan
1	Magang	Magang Single Track Magang Double Track	Minimal 1 bulan	3-9	Laporan magang, skripsi karya, dan artikel jurnal	Semester 5
2	Pertukaran Mahasiswa	Melakukan proses pembelajaran di kelas pada level antar prodi di UGM maupun antar Universitas	Minimal 1 semester	3-24	Laporan CPL dan SKS yang diambil	Semester 5
3	Riset	Melakukan riset di lembaga riset yang menjadi tujuan MBKM	Minimal 1 semester	3-9	Laporan penelitian, monografi, book chapter (nasional maupun internasional), artikel jurnal (nasional maupun internasional), skripsi karya	Semester 5
4	Kewirausahaan Sosial	Melakukan kegiatan kelas dan praktik kewirausahaan sosial	Minimal 1 semester	3-6	Laporan ide bisnis sosial	Semester 6

Mata Kuliah Semester 5

S1 MKP
<p>Mata Kuliah Wajib</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Agama (2 SKS) 2. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik (4 SKS) 3. Teknik Pengambilan Keputusan (4 SKS) 4. Manajemen Perubahan Sektor Publik (4 SKS) 5. Etika dan Akuntabilitas Publik (4 SKS) 6. Public Service Innovation (4 SKS) 7. Decision Making Techniques (4 SKS)

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 8. Public Sector Accountability (4 SKS) 9. Digital Governance (4 SKS) |
|--|

2 Mata Kuliah Pilihan Departemen

- 1. Institusi Internasional (3 SKS)
- 2. Isu dan Kebijakan Desentralisasi (3 SKS)
- 3. Sustainable Tourism Development (3 SKS)
- 4. Politik dan Kebijakan Small and Medium Enterprise (3 SKS)
- 5. Manajemen Bencana (3 SKS)
- 6. Komunitas ASEAN dan Sektor Publik (3 SKS)
- 7. Manajemen Resiko Sektor Publik (3 SKS)
- 8. Audit Internal Sektor Publik (3 SKS)
- 9. MAGANG (3 SKS)

IDP CUMPOL SARY COURSES

- 1. ASEAN Community (4 SKS)
- 2. Globalization and Trade (4 SKS)

PM CUMPOL SARY COURSES

- 1. Knowledge Management and Innovation (4 SKS)
- 2. Marketing for Public Sector (4 SKS)

PP CUMPOL SARY COURSES

- 1. Global Public Policy (4 SKS)
- 2. New Media and Policy (4 SKS)
- 3. International exposure (Max 24 SKS)

Mata Kuliah Semester 6

S1 MKP

Mata Kuliah Wajib

- 1. Kewarganegaraan (2 SKS)
- 2. Kuliah Kerja Nyata (3 SKS)
- 3. Advokasi dan Resolusi Konflik (4 SKS)
- 4. Politik Anggaran (4 SKS)

3 Mata Kuliah Pilihan Departemen

1. Gendering Public Policy (3 SKS)
2. Korupsi dan Anti Korupsi (3 SKS)
3. Pemasaran Sektor Publik (3 SKS)
4. Social Entrepreneurship (3 SKS)
5. Collaborative Governance (3 SKS)
6. Pembangunan Kelembagaan (3 SKS)
7. Perilaku Organisasi (3 SKS)
8. Administrasi Perpajakan (3 SKS)
9. Globalisasi dan Sektor Publik (3 SKS)

IDP CUMPOLSKARY COURSES

1. Energy Security (4 SKS)
2. International Tourism (4 SKS)
3. NGOs and International Development Assistance (4 SKS)
4. Small and Medium Enterprise in Global Market (4 SKS)
5. International Institution (4 SKS)

PM CUMPOLSKARY COURSES

1. Climate Change and Disaster Management (4 SKS)
2. Public Private Partnership (4 SKS)
3. Risk Management (4 SKS)
4. Public sector Audit (4 SKS)
5. International Institutional (4 SKS)

PP CUMPOLSKARY COURSES

1. Gendering Public Policy (4 SKS)
2. Urban Governance and Global Cities (4 SKS)
3. Decentration Policy (4 SKS)
4. Corporate Social Responsibility and Governance (4 SKS)
5. International Institution (4 SKS)
6. International exposure (Max 24 SKS)

J. Deskripsi Mata Kuliah

Semester 5

1. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik (SPA 3520)

Kegiatan perkuliahan diselenggarakan untuk mengasah daya kritis mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki kemampuan untuk memilih desain evaluasi yang sesuai dengan karakteristik kebijakan yang akan dievaluasi serta konteks sosial, kultural, dan politik dimana kebijakan dikembangkan dan diimplementasikan. Mahasiswa didorong untuk bukan hanya menilai bagaimana kualitas implementasi kebijakan atau pencapaian target dan sasaran kebijakan, tetapi juga mengkritisi kualitas desain kebijakan. Metode penelitian evaluasi yang

dikembangkan adalah kuantitatif dan kualitatif serta kemungkinan mengenai berkembangnya dalam bentuk mix-methods

2. Teknik Pengambilan Keputusan (SPA 3521)

Mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan memberikan wawasan mengenai proses pembuatan keputusan serta berbagai teknik yang bisa diterapkan untuk pengambilan keputusan. Mata kuliah ini mencoba menawarkan berbagai alat analisis untuk memilih alternatif dalam mengambil keputusan. Teknik-teknik kuantitatif yang diadopsi dari ilmu ekonomi, ekonomi manajerial (*managerial economics*) maupun riset operasi (*operation research*) dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan keputusan.

3. Manajemen Perubahan Sektor Publik (SPA 3522)

Kuliah ini diselenggarakan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam mengenali perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, dan bagaimana konsekuensi dan responnya bila ditinjau dari struktur/kultur organisasi dan gaya manajemennya. Kuliah ini juga didesain untuk dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menganalisis perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, dan merekomendasikan bentuk perubahan organisasi dan respon manajemen terhadapnya

4. Etika dan Akuntabilitas Publik (SPA 3523)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang etika terapan dalam organisasi publik. Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dari kuliah ini, yaitu: mengajarkan ketentuan dan prinsip-prinsip etika dalam tugas tugas administrasi publik, mendiskusikan berbagai masalah moral dan etis yang muncul dalam kebijakan publik dan pelayanan publik, serta memberikan penghayatan tentang kewajiban dan tugas-tugas khusus yang diemban oleh seseorang yang aktif dalam kegiatan organisasi publik.

5. Institusi Internasional [SPA 3551]

Mata kuliah ini dirancang bagi mahasiswa agar lebih memahami keberadaan dan peran lembaga-lembaga internasional dalam mengubah dunia. Beberapa pertanyaan yang sangat mendasar yang harus dijawab adalah: bagaimana dan dengan cara apa memahami lembaga internasional dan mengapa itu penting? Dalam arena kebijakan publik, efek apa yang dibawa lembaga internasional terhadap masing-masing negara dan bagaimana mengelola efek tersebut? Apa yang harus dilakukan negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk membuat kesepakatan yang lebih baik dengan lembaga-lembaga internasional? Kombinasi perspektif teoritis dan pendekatan empirik studi kasus akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

6. Isu dan Kebijakan Desentralisasi (SPA 3552)

Mata kuliah Isu dan Kebijakan Desentralisasi ini hendak membahas berbagai dimensi penting dari kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Selain itu, diskusi akan diarahkan pada implikasi dari implementasi kebijakan desentralisasi pada munculnya berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi baik di pusat dan terutama di daerah. Isu yang didiskusikan antara lain: penataan struktur organisasi pemerintah, keuangan daerah, kinerja pelayanan publik, hubungan eksekutif-legislatif daerah, model pilkada, serta persoalan peningkatan efektivitas kerja pemerintah, dan seterusnya.

7. Corporate Social Responsibility and Governance (SPA 3553)

CSR dikembangkan sebagai mata kuliah yang didasarkan atas berbagai macam penafsiran terhadap konsep CSR yang diselenggarakan di hampir setiap perusahaan di Indonesia dengan berbagai macam variasi dan strategi yang berbeda. Namun demikian, hanya sedikit sekali bahkan bisa dikatakan belum ada perusahaan di Indonesia yang meletakkan CSR dalam konsep governance. Materi yang dikembangkan dalam kuliah ini tidak hanya mendiskusikan teori dan konsep CSR, tetapi juga mengkritisi praktik-praktik CSR perusahaan di Indonesia dalam perspektif governance. Pada akhir-akhir perkuliahan juga akan dikenalkan bagaimana mengelola CSR semenjak perencanaan, perkembangan, hingga evaluasinya.

8. Sustainable Tourism Development (SPA 3554)

Kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai gambaran umum pariwisata, pendekatan pembangunan pariwisata tujuan dan manfaat industri pariwisata, organisasi dan kelembagaan pariwisata, tugas dan fungsi pemangku kepentingan kepariwisataan, proses pengembangan kepariwisataan, contoh jenis objek dan atraksi wisata serta kategorisasi objek daya tarik wisata. Setelah menerima pembelajaran ini, peserta kuliah diharapkan dapat memahami batasan dan pengertian tentang unsur-unsur pariwisata.

9. Politik dan Kebijakan Small and Medium Enterprise (SME) (SPA 3555)

Small and Medium Enterprise (SME) atau Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, baik di negara berkembang maupun negara maju (Tambunan,2009). Peran UMKM dalam setiap negara berbeda. Dinamika, latar belakang dan kebijakan yang berbeda menghasilkan peran yang variatif. Fokus mata kuliah ini adalah membahas small and medium enterprise dilihat dari sisi politik. Sebagai calon pengambil kebijakan publik, mahasiswa MKP sudah seharusnya memahami berbagai persoalan UMKM ini.

10. Manajemen Bencana (SPA 3556)

Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang bencana, upaya pengurangan resiko bencana, bagaimana bencana harus dikelola dalam konteks hubungan antar level pemerintahan dan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan manusia serta bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim.

11. Komunitas ASEAN dan Sektor Publik (SPA 3557)

Mata kuliah ini mengenalkan mahasiswa terhadap lanskap ekonomi regional baru dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Lanskap baru tersebut memungkinkan aliran barang, jasa dan tenaga terampil berjalan secara bebas tanpa hambatan tarif maupun non-tarif. Aliran faktor-faktor produksi dikelola dengan berbagai macam harmonisasi kebijakan di tingkat regional sehingga kebijakan antar satu negara dengan negara lain terkoneksi. Karena itu, lazim bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang dan meminimalisasi dampak negatif dari penerapan MEA dengan pendekatan baru dalam sektor publik

12. Manajemen Resiko Sektor Publik (SPA 3558)

Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa pentingnya proses mitigasi ataupun pengendalian resiko yang berpotensi mengganggu pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko sektor publik sangat penting dalam upaya membangun daya saing pelayanan publik, sehingga sasaran dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, beberapa poin penting yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini, diantaranya: cara penilaian atas risiko, identifikasi risiko, dan proses penerapan manajemen risiko di sektor publik.

13. Audit Internal Sektor Publik (SPA 3559)

Audit Internal Sektor Publik adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang perkembangan lingkup kegiatan audit diantaranya audit kecurangan, audit operasional, audit kepatuhan, dan sebagainya, bukan hanya terbatas pada audit atas laporan keuangan saja. Lebih jauh mata kuliah ini akan mempelajari peran dan kontribusi audit internal sektor publik.

14. Public Service Innovation(SPA3519IUP)

This course is aimed at making students able to understand the basic concepts of public service, the imperatives to reform and innovations in public services as well as mastering basic skills in performing innovative public services. This course is designed to give students the knowledge on public goods and role of government, nature, principles and value of public services as well as public service reform and innovation principles. Besides regular lectures, the course will include student presentations followed by class discussions, and a public service innovation simulation to bring the dynamics, the emerging issues and the best practices of an innovative public service to the surface.

15. Decision Making Techniques (SPA3520IUP)

This course is designed to improve the students' decision making skills and their ability to perform an effective and creative decision making process individually and collectively. The course will provide students with knowledge regarding individual decision making, methods of decision making, the sequence of decisions and decision trees, as well as the psychological aspects of decision making. Besides lectures, students will have decision making techniques simulation to enhance the students' skills.

16. Public Sector Accountability (SPA3521IUP)

This course is designed to give students understanding about the dimensions of contemporary concepts of accountability and how these impact upon management processes in the public sector. The course allows students to be able to understand the models of accountability and management reports and provide judgment as to improve the management of an organization and critically evaluate government accountability. The Course will arm students with the concept of accountability and its mechanism process. The course gives students the opportunity to understand models of accountability which provide students with various approaches (i.e., public management and accountability, public participation and accountability) to enhance public accountability.

17. Digital Governance (SPA3522IUP)

The course discusses the development of digital governance and its significance for public sector. The focus will be on how digital governance based on information and communication technologies affect the way public sector does its business. It covers the promises of digital governance in, among others, delivering better public services, improving policy making process, broadening public participation, and enhancing public accountability. The downsides of digital governance are discussed such as the threat to both personal privacy and institutional secrecy as well as access for every citizen. Combining theoretical perspectives and case studies in a comparative manner, the course will also look critically on the preconditions for successful digital governance in delivering its promises and these include sufficient and accessible infrastructure, social acceptability, political feasibility as well as administrative capacity. The course will draw some implications or lessons for developing countries if they are to follow more advanced countries in applying digital governance

18. ASEAN Community (SPA3523IUP)

This course is designed to give students understanding about the history and dynamics of ASEAN and its importance in global economy, its role in the development of ASEAN countries; and some obstacles that ASEAN countries may face. Within the course, the students will participate in the discussion of functionalism vs. neo-functionalism as a reason of ASEAN integration as well as conceptualization of state-building, on how they deal with the issues of political institutionalization and political development; how they create the institutions and rules of the game within domestic politics; and nation-building, on how countries in the region deal with the issue of nation building and how they develop sociocultural basis for national integration. The course offers students understanding of the three pillars of ASEAN and how ASEAN is managing differences among its member countries. Students have the opportunity to discover ASEAN from various perspectives as the course brings students comparative case studies (i.e., Comparative Politics, Economy of Development, and the waves of democratization).

19. Globalization And Trade (SPA3526IUP)

The course introduces students to the latest development of globalization by focusing on international/global trade. It covers both theoretical perspectives and empirical facts on how globalization really works in international trade. Students will be provided with opportunity to discuss in depth contemporary globalization debates and theories of international trade by looking critically at key arguments and how they work in the real world. Key international and global regimes on globalization and trade such as the WTO will also be discussed critically. The course will also discuss some of the policy implications to be responded by policy makers especially in developing countries in making the most out of globalization and trade while managing all the downside.

20. Knowledge Management And Innovation (SPA3524IUP)

This course is designed to build an understanding among students on today's "knowledge economies" as the emergence of new paradigms for innovation and the advancement of knowledge in relation to economic activities, and the role of public sector. The course will provide students with knowledge regarding knowledge economy in a globalizing world, how the knowledge economies could embrace industrial renewal, and also changing dynamics of knowledge society. Students will also learn the role of public sector on governing the knowledge economy system and implementing innovation policy. For completing the course, students are offered to measure the R&D in developing countries through international comparability and policy relevance.

21. Marketing For Public Sector (SPA3527IUP)

This course is designed to build an understanding about the basic concepts, principles and strategies of public sector marketing. The course will provide students with knowledge regarding the basic concepts of marketing, principles of marketing, marketing strategies in public sector and dynamic issues in public sector marketing in Indonesia. Students will also learn to practice basic skills in public sector marketing by doing marketing research project along with case study-base discussions and lectures.

22. Global Public Policy (SPA3525IUP)

The Global Public Policy course is aimed at making students able to understand the globalization and its impacts on public sector and the role of public sector in maximizing the benefit of globalization and reducing its costs and risks and to examine policy issues arising out of the globalization process and restructuring. This course is designed to give the students an overview of the international cooperation and the actors in international relation, as well as global governance and its role.

23. New Media And Policy (SPA3528IUP)

This course is designed to build an understanding on how the new media affects public policy, and is affected by it in turn. The course will provide students with knowledge regarding theories of media influence, the role of media in democracy, social media and public policy, agenda setting through new media as well as business, media and public relation on the new media issues. Students will also learn to practice basic skills in analyzing media content and how it affects the policy process.

Semester 6

1. Advokasi Kebijakan dan Resolusi Konflik (SPA 3624)

Advokasi Kebijakan adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman tentang suatu alat kebijakan berupa advokasi untuk mengubah kebijakan publik. Fokus kuliah ini adalah mendiskusikan dan mempelajari lebih mendalam, baik dalam tataran ideologis maupun strategis, sehingga advokasi dapat berperan sebagai alat pengubah kebijakan publik, dan perubahan sosial yang diinginkan dapat tercapai.

2. Politik Anggaran (SPA 3625)

Sistem Penganggaran Pembangunan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang dimaksudkan untuk memberikan bekal teori, analisis, maupun keterampilan teknis yang berkaitan dengan anggaran publik di Indonesia. Ada tiga hal penting yang mempengaruhi pokok pembahasan mengenai sistem penganggaran di Indonesia sekarang ini, yaitui 1). Mekanisme politik dalam pembuatan kebijakan fiskal, 2). kebijakan desentralisasi fiscal, dan 3). efektivitas pembiayaan publik.

3. Gendering Public Policy (SPA 3660)

Mata kuliah Gendering Public Policy akan mendiskusikan perspektif yang lebih berkeadilan tentang peran gender laki-laki dan perempuan di ranah kajian manajemen dan kebijakan public. Oleh karena itu, mata kuliah ini akan mendiskusikan diskursus peran gender dalam pembangunan dan ruang publik, perspektif feminis dan gender mainstreaming dalam proses kebijakan dan manajemen publik. Untuk melengkapi proses pembelajaran, berbagai metode analisis gender didiskusikan dan diaplikasikan dalam mendiskusikan gender dalam MKP.

4. Korupsi dan Anti Korupsi (SPA 3661)

Korupsi dan Anti Korupsi merupakan mata kuliah yang dirancang bagi para mahasiswa yang ingin memahami salah satu faktor terpenting yang menyebabkan perubahan pada aspek ekonomi, sosial dan politik terutama pada Negara berkembang, yaitu KORUPSI. Berbagai aspek korupsi akan dibahas secara mendalam, dengan mengambil pelajaran sebagian besar dari pengalaman negara-negara berkembang dan khususnya Indonesia, negara yang masih berjuang sangat keras untuk memberantas korupsi. Konsep, penyebab, konsekuensi, dan upaya pemberantasannya adalah isu utama yang akan dibahas dalam mata kuliah ini.

5. Pemasaran Sektor Publik (SPA 3662)

Mata kuliah ini didesain dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dan teori dasar marketing serta aplikasinya di organisasi sektor public dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik kepada masyarakat. Konsep dan teori yang didiskusikan adalah marketing mix, marketing segmentation, peranan dan harapan pemangku kepentingan, pemasaran sosial, strategi pemasaran, dan komunikasi dan promosi dalam pemasaran.

6. Social Entrepreneurship (SPA 3663)

Adanya mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat, memberikan pemahaman dan pengayaan tentang teori, pendekatan dan strategi mengenai pemberdayaan masyarakat. Selain itu, memberikan kemampuan untuk merencanakan dan melakukan manajemen dalam penyelenggaraan mampu memonitor serta mengevaluasi pemberdayaan masyarakat. Pada tataran teknis kuliah ini juga memberikan kecakapan dalam proses pendampingan masyarakat dengan menerapkan tahapan pemberdayaan masyarakat secara tepat.

7. Collaborative Governance (SPA 3664)

Kajian ini bertujuan untuk melakukan elaborasi mengenai kerangka kerja *collaborative governance*. Pembahasan mengenai teori yang bersangkutan dengan tata-kelola pemerintahan kolaboratif dipelajari sehingga mampu dikontekstualisasikan dengan fokus penelitian yang berbeda-beda. Pembahasan mengenai collaborative governance ini juga tidak terlepas dari pembahasan mengenai public private partnership. Diskusi akan diarahkan pada praktik dan kendala implementasi dari berbagai kasus collaborative governance yang berkaitan dengan kerangka hukum, kapasitas organisasi dan kapasitas SDM.

8. Pembangunan Kelembagaan (SPA 3665)

Mata kuliah Pembangunan Kelembagaan atau Pembangunan Institusi (*institutional building*) didesain untuk mengantar mahasiswa agar lebih mengenal dan memahami isu-isu kelembagaan dalam konteks ilmu administrasi negara. Pokok-pokok bahasan dalam perkuliahan difokuskan untuk menjawab sejumlah pertanyaan kritis: "Apakah yang dimaksud dengan institusi dan apa bedanya dengan organisasi? Bagaimanakah pembangunan institusi seharusnya dilakukan dalam sistem sosial di Indonesia?".

9. Perilaku Organisasi (SPA 3666)

Mata kuliah ini didesain dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep-konsep dasar perilaku organisasi beserta aplikasinya. Selain itu mata kuliah ini didesain untuk membantu mahasiswa melakukan refleksi terhadap atribut dalam dirinya, yang selanjutnya bisa digunakan untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki. Terakhir, mata kuliah ini diarahkan untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan meningkatkan problem solving skill sehingga mahasiswa mampu mengurangi defisit logika teoritis dengan logika empiris.

10. Administrasi Perpajakan (SPA 3667)

Mata kuliah ini didesain untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan terkait proses penatausahaan dan pelayanan perpajakan. Pokok-pokok bahasan yang dipelajari dalam perkuliahan difokuskan untuk menjawab beberapa isu mengenai masalah administrasi perpajakan di Indonesia dan aspek penentu keberhasilan administrasi perpajakan.

11. Globalisasi dan Sektor Publik (SPA 3668)

Kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa tentang globalisasi dan pengaruhnya terhadap sektor publik. Tujuan pokoknya adalah menjadikan sektor publik yang siap memanfaatkan sejumlah peluang globalisasi sekaligus meminimalisasi resikonya. Desain perkuliahan akan diawali dengan melakukan diagnosis atas globalisasi berikut sejumlah peluang dan tantangannya dan ditutup dengan berbagai implikasi praktis yang harus dilakukan sektor publik untuk menyikapinya.

12. Energy Security (SPA3629IUP)

This course is designed to improve the students' understanding on the structure and political economy aspect of energy security and skills to improve the ability to write a strong, clear and compelling policy brief. The course will provide students with matters regarding energy and political economic issues, environmental issues related to energy industry, national and regional energy issues, the importance of Middle East in energy issues, existing versus alternative energy development, and energy diplomacy. Besides lectures, students will have to write a research paper and make a class seminar.

13. International Tourism (SPA3632IUP)

The International Tourism course is aimed at making students able to understand the concepts of tourism planning and tourism policy, the actors in domestic and international level as well as the impacts – positive and negative, economic, socio-cultural and environmental – of tourism on host environments and communities. This course is designed to give the students an overview of the shifting tourism planning and policy on its development process. The course will provide an understanding of tourism development anatomy that includes the tourism development approaches - both market approach and product approach. Besides regular lectures, the course

will include student presentations followed by class discussions, and a field study to bring actual experience to the students.

14. NGOs and International Development Assistance (SPA3635IUP)

By taking the NGOs and International Development Assistance course, students are expected to acquire the broad and well-balanced knowledge of “aid”, including its controversial debates on why aid, the effectiveness of aid and the historical evolution of aid strategies and approaches, as well as the basic principles of aid structures. Within the course students will receive various materials such as international development basic principles, structure and logics of international development assistance. The course will be delivered through lectures also case study-based discussions and class seminars.

15. Small and Medium Enterprise IN Global Market (SPA3638IUP)

This Course is designed to build an understanding about small and medium size enterprises and its importance in economy, its role in development and some challenges that small and medium size enterprises may face and how to support the small and medium enterprises to survive in global economy. By taking the course students are expected to be able to examine the unique issues relating to the operation and management of small and medium enterprises.

16. Climate Change And Disaster Management (SPA3630IUP)

Water crisis, extreme weather, hurricane, flood, and landslide are examples of a disaster that is created by the global climate change; and disaster management is a rapidly emerging subject that has key roles in lessening the impact of both human and ecological catastrophes. By taking this course, students are expected to be able to understand basic concepts in managing disaster and mastering basic skills in disaster management and mitigation. The course will allow students to learn about disaster and climate change from various perspectives, disaster and crisis and how local government reacts on it in a comparative perspective. Students also have the chance to understand the principle of disaster management and its obstacles, learn the value of social capital and local wisdom that influence disaster management, as well as understand the social vulnerability against disaster. The course will be delivered through lectures and case study-based discussions.

17. Public Private Partnership (SPA3633IUP)

This course aims to make students understand the basic concepts and dynamics of managing public issues within the frame, mode and institutional arrangement of publicprivate partnership. The course will provide students with matters regarding principles in managing public issues, principles of governance and network management, publicprivate partnership concept, models and practices, as well as dynamic and emerging issues in public private partnership. Students will also learn to practice their skills to identify public issues and problems suitable to address by

public-private partnership scheme, also to build strategies to implement an effective public private partnership.

18. Risk Management (SPA3636IUP)

This course deals with the ways public sector assesses, controls, reduces and manages risks in performing its basic functions. It will be delivered in two main parts. The first part discusses any potential risks faced by public organizations, mainly social, political and economic risks. This includes social unrest, social conflict, terrorism, political instability, policy uncertainty, economic downturn or crisis, and many others. The second part of the course will focus on how public organizations control and manage the risks as part of daily business. Students will be armed not only with knowledge on the risks public organizations have been facing and continue to face but also the methods to manage those risks. The course also discusses the risks caused by public organizations to their environment and how to reduce or manage such risks. Instruments such as regulatory impact assessment and simple risk analysis techniques will also be used to equip students with basic skills to analyze and manage risks.

19. Public Sector Audit (SPA3639IUP)

The course deals with auditing in public sector as a means to enhance accountability, integrity and legitimacy of public organizations. Students will be armed with basic knowledge and skills on the institutional framework for public auditing bodies, principles of effective auditing, the process and standards in conducting auditing, the code of conduct and ethics in undertaking auditing, and the arrangements to ensure accountability, transparency and independence, as well as the utilization of auditing results. While the focus will be on standard auditing tools and processes as commonly used in public sector, the course also covers more contemporary auditing approaches such as social auditing or social accounting. The course combines theoretical perspectives and case studies to enable students to have stronger understanding and basic auditing skills.

20. Gendering Public Policy (SPA3631IUP)

By taking the Gendering Public Policy course, students are expected to understand the basic concepts of gender and gender as public issues as well as to have knowledge and perspective in order to put both genders equally to shape the public policy and to access public services. Within the course, students will receive various materials on the concept of gender and equality, gender perspectives and feminism theories, gender sensitive budgeting as well as public policy and the role of government in gender-related issues.

21. Urban Governance And Global Cities (SPA3634IUP)

By taking the Urban Governance and Global Cities course, students are expected to understand causes of urban issues with regards to governance and public policy as well as to be able to conduct an advocacy and community empowering program for urban issues. Within the course,

students will receive various materials such as city concepts, the classification, functions and scope, urban development paradigm, urban governance in public policy, urban economics, health and population policy in urban development, and smart cities concept.

22. Decentralization Policy (SPA3637IUP)

The course is designed to discuss and develop better understanding on decentralization. In many countries, developed, developing or underdeveloped, decentralization has been seen as an effective policy tool mainly but not exclusively to improve public services. Taking a comparative perspective, this course will focus on several key issues: the motives, arrangements, real performance, as well as enabling and constraining factors. The course will also look comparatively in depth the three main types of decentralization: political, administrative and fiscal decentralization. Current development such as asymmetrical decentralization will also be discussed. By taking the course, students are expected to have better and much more critical knowledge on decentralization.

23. Corporate Social Responsibility and Governance (SPA3640IUP)

There are different interpretations of the concept of Corporate Social Responsibility delivered by a company; and it often appears in a number of different forms and strategies. Very few companies, however, place CSR within the concept of governance. The materials developed in this course will not only discuss the theories and concepts of CSR, but also criticize the CSR practices in Indonesia from governance perspective. At the end of the course, students will also be introduced to ways of planning, developing and evaluating a CSR.

24. Community Service (KKN) (UNU5000IUP)

This university compulsory course is a live-in community service. Students will be organized in groups and assigned to different parts of Indonesia where they would design 2-month development programs tailored to the needs of the host community. Students will have the opportunity to put into practice a multi-disciplinary project as a result of their in-depth analysis on all aspects of the community's life.

25. International Institution (SPA3641IUP)

This course is designed for students to better understand the existence and roles of international institutions in a ever changing world. Some of the very basic questions to be answered are: how and in what ways should international institutions be understood and why is it urgent? How are the relationships among international institutions and developing countries – their government and people – and what are the implications? In public policy arena, what effects do international institutions bring for each respective country and how to manage such effects? What should developing countries like Indonesia do to better deal with international institutions? A combination of theoretical perspective and closer empirical case studies will be employed to answer those questions.

26. International Exposure

This program is uniquely designed for IUP students. Upon completing a certain set of requirements, students will have the opportunity to study in one of our partner universities overseas. There are several schemes available: 1) student exchange, 2) study abroad, 3) short course, 4) double degree, and/or 5) fast track. All schemes are carefully planned for the purpose of providing the students with an insightful international learning experience, which in turn will help them succeed in becoming future global leaders.

